

# STRATEGI PENGENDALIAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUKABUMI

Oleh: **Nur Handayani dan Tumija**  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## *Abstract*

*This study aimed to describe what needs improvement efforts and strategies need to be developed in controlling poverty in Sukabumi.*

*The method used is descriptive method with qualitative approach. Data were collected using the method of observation, interviews and documentation as well as analyzed through editing, data classification, data tabulation, data tabulation.*

*The main strategy for poverty reduction in Sukabumi is the expansion of employment and business opportunities, empowerment, capacity building of human resources, social protection, improvement of environmental quality, increased partnerships, population control.*

*Based on the results of analysis show that efforts need to be enhanced in the implementation of the control strategy of poverty in Sukabumi are: the establishment of the Institute of Microeconomics, adding Development Facility art and culture., utilization kinds of metal and non-metallic minerals, increase the population of cows, chickens and ducks to meet the shortage of meat, milk and eggs, increased production of corn, increasing the role of MCC/TKSM in handling POM and Social Welfare, peningkatam participation of women in society, the addition of educational facilities., adding human resources (medical, non-medical and medical support) and facilities health particularly in hospitals Pelabuhanratu and Jampangkulon, improved coordination in the area of disaster management; increased knowledge to the community in the face of disaster area if at any time there, lowering the number of slum areas merwujudkan appropriate housing.*

*The strategy needs to be developed in controlling poverty in Sukabumi is added vocational training equipment and add qualified instructors, controlling population growth , increasing the Human Resources (HR) both farmer groups and government officials that there is to be able to exploit natural resources in accordance with local potentials and local environmental conditions, adding a source providing sufficient irrigation to anticipate the dry season, the increase in the cage and anticipate the H5N1 virus, the addition of agricultural extension workers, additional infrastructure agricultural extension, control over productive land use, agricultural extension budget increase, fisheries and forestry; increase the interest of young people to the field of agriculture, the provision of land for educational purposes.*

**Keywords:** *efforts and poverty control strategy*

## PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan dewasa ini, sudah menjadi persoalan serius dan mendesak untuk ditanggulangi karena persoalan kemiskinan dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dalam berbagai aspeknya. Kerentanan yang ditimbulkan akibat kemiskinan tidak hanya berdampak pada lingkungan dan hanya berlangsung pada waktu tertentu semata, namun dapat meluas mempengaruhi ketahanan bangsa dan negara.

Pemerintah Daerah selaku pengemban amanat rakyat harus senantiasa aktif untuk menciptakan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan

layanan dasar yang murah, mudah dan bermutu bagi masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah tentunya akan lebih berpihak pada masyarakat miskin yang menjadi prioritas pembangunan di daerahnya dengan menggunakan sumber daya dan sumber dana yang lebih efisien dan efektif

Demikian pula di Kabupaten Sukabumi, kemiskinan merupakan suatu masalah multidimensi memberikan dampak ke berbagai faktor kehidupan. Upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi karena:

1. Menjalankan misi kemakmuran yang bersifat universal, yaitu memanusiakan manusia sesuai hak azasi yang dimilikinya dan agar kehidupan masyarakat menjadi adil dan makmur.
2. Menciptakan keadilan dalam bentuk pemerataan kesempatan kerja, berusaha dan kesempatan kerja hasil pembangunan.
3. Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi serta mendukung kegiatan ekonomi produktif di Kabupaten Sukabumi.
4. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengeluarkan masyarakat Sukabumi dari belenggu keterbelakangan.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan pada kewajiban moral dan amanat konstitusi UUD'45 terutama pasal 27, 28 H, 31 dan pasal 34.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi telah dibentuk komite penanggulangan kemiskinan Daerah Kabupaten Sukabumi melalui keputusan Bupati Sukabumi No.412 Tahun 2002. Selanjutnya pada tahun 2011 di bentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukabumi melalui Keputusan Bupati Sukabumi No.050/Keputusan/407 Bappeda/2011.

Pembentukan Tim Koordinasi ini sebagai tindak lanjut dari Permendagri RI No.42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Sukabumi sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Keanggotaan Tim Koordinasi terdiri dari unsur-unsur pemerintah, masyarakat dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan dari data [sukabumikab.bps.go.id/index.php/penduduk-dan-tenaga-kerja](http://sukabumikab.bps.go.id/index.php/penduduk-dan-tenaga-kerja) jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2011 = 246.108 jiwa (10,33%) dan tahun 2012 = 234.000 jiwa (9,72%). Dari data tersebut dapat diketahui walaupun jumlah jiwa miskin tahun 2012 mengalami penurunan dibanding tahun 2011, namun jumlah kepala keluarga miskin mempunyai kecenderungan meningkat.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sukabumi”.

## **PERMASALAHAN**

Bertolak dari pembatasan masalah yang akan diteliti, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Upaya apa yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan strategi pengendalian kemiskinan di Kabupaten Sukabumi ?
2. Strategi apa yang perlu dikembangkan dalam pengendalian kemiskinan di Kabupaten Sukabumi ?

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data, mengidentifikasi data dan menganalisis data yang terkait dengan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan upaya yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan strategi pengendalian kemiskinan di Kabupaten Sukabumi
2. Untuk mendiskripsikan strategi yang perlu dikembangkan dalam pengendalian kemiskinan di Kabupaten Sukabumi

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Strategis**

Menurut Ermaya Suradinata (1997:146) Strategi adalah suatu upaya yang dilakukan secara rasional dengan memperhitungkan aspek terkait untuk mencapai suatu tujuan.

Stoner dan Wanber (1993:161) menyatakan bahwa strategi dapat disoroti sekurang-kurangnya dari dua aspek yang berbeda. Perspektif pertama, strategi didefinisikan sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Perspektif kedua, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Selanjutnya menurut Ohmal dalam Salusu (1996:91) strategi merupakan suatu rencana kerja untuk melaksanakan kekuatan suatu pihak dalam menghadapi berbagai kegiatan usaha.

Rumus strategi menurut Hax dan Magluf dalam Salusu (1996:100) adalah sebagai berikut:

1. Suatu pola yang konsisten, menyatu dan integral.
2. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang bertindak dan prioritas alokasi sumber daya.
3. Menyeleksi bidang yang akan digeluti organisasi.
4. Mencoba mendapatkan keuntungan yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi dan kekurangan serta kelemahannya.
5. Kebaikan semua tingkat hierarki dan organisasi.

Lebih lanjut Hax dan Magluf mengemukakan petunjuk pembuatan strategi sukses yaitu sebagai berikut:

1. Strategi harus konsisten dengan lingkungannya.
2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi.

3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lainnya.
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik yang justru kelemahannya.
5. Sumberdaya dalam suatu strategi adalah suatu yang kritis.
6. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
7. Tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yaang terkait, terutama dari para eksekutif dan dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.

Dari pendapat di atas maka yang dimaksud dengan strategi penanggulangan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan secara rasional dalam penanggulangan kemiskinan dengan memperhitungkan aspek-aspek terkait untuk mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan dan agar strategi penanggulangan kemiskinan dapat berhasil (sukseks) maka program penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan secara integratif, partisipatif, aplikatif, ekonomis dan berkesinambungan dengan penekanan pada optimalisasi potensi lokal sesuai kebutuhan masyarakat dan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah.

### **Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari aspek dan dimensi ekonomi semata. Dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta tahun 2001, kemsikinan diartikan sebagai keadaan tidak berharta benda, serba kurang.

Sementara pada *The Concise Oxford Dictionary* mendefinisikan kata “poor” sebagai “*lacking adequate money or means to live comfortably*”. Dengan pengertian tersebut, harta benda didefinisikan lebih luas lagi tidak sekedar uang semata.

#### **a. Kriteria Kemiskinan**

Berdasarkan hasil penelitian *World Bank* dalam Jusman (1999:25) rumah tangga miskin pada umumnya adalah rumah tangga yang:

1. Mempunyai anggota rumah tangga banyak.
2. Kepala rumah tangganya merupakan pekerja rumah tangga.
3. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga maupun anggotannya rendah.
4. Sering berubah pekerjaan.
5. Sebagian mereka yang telah bekerja masih mau menerima tambahan pekerjaan lagi bila ditawarkan.
6. Sebagian besar sumber pendapatan utamanya adalah dari sektor pertanian. Di daerah pedesaan rumah tangga yang anggotanya bekerja di sekitar pertanian adalah mereka yang menguasai tanah sangat marginal (tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan rumah taangga).
7. Kondisi tempat tinggal masih memprihatinkan terutama dalam hal penyediaan air bersih dan listrik untuk penerangan.

Pada tahun 1982, Prof. Dr. Emil Salim, dalam Jusman (1999:27) mengemukakan lima ciri mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

1. Pada umumnya mereka tidak memiliki faktor produksi seperti: tanah, modal, ataupun keterampilan yang cukup, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikannya rendah, tidak sampai tamat Sekolah Dasar, waktu mereka tersisa habis untuk mencari nafkah dan mendapatkan tambahan penghasilan.
4. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan, tidak memiliki tanah dan walaupun ada sangat kecil. Pada umumnya mereka menjadi buruh atau pekerja kasar di luar sektor pertanian. Kesenambungan kerja kurang terjamin karena mereka bekerja sebagai buruh musiman dengan upah yang sangat rendah. Tidak sedikit jumlah mereka yang menjadi pekerja bebas dalam usaha apa saja (sektor informal).
5. Mereka yang hidup di tengah kota masih berusia muda dan tidak didukung sengan keterampilan yang memadai.

**b. Indikator Kemiskinan**

Selanjutnya indikator kemiskinan yang sering dijadikan acuan bagi kepentingan pemerintah adalah indikator versi BKKBN yang memuat pentahapan tingkat kesejahteraan masyarakat atau keluarga dalam lima kelompok yaitu sebagai berikut:

a. Keluarga Pra-Sejahtera

Yaitu keluarga-keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara maksimal seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan dan kesehatan.

Indikator keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi salah satu atau lebih indikator Keluarga Sejahtera I.

b. Keluarga Sejahtera I

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Indikator keluarga sejahtera I adalah:

1. Melaksanakan ibadah
2. Makan dua kali sehari atau lebih
3. Memiliki berbeda untuk berbagai aktivitas
4. Bagian terluas lantai rumah bukab dari tanah
5. Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan

c. Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya seperti kebutuhan menabung dan memperoleh informasi.

Indikator untuk Keluarga Sejahtera II adalah:

1. Ibadah secara teratur
2. Mampu memakan daging/telur/ikan satu kali seminggu
3. Mampu mengadakan minimal satu stel pakaian baru setahun
4. Luas tanah/rumah rata-rata 5 m<sup>2</sup> perjiwa
5. Sehat dalam 3 bulan terakhir
6. Punya penghasilan tetap
7. Usia 10-60 tahun bisa baca tulis huruf latin
8. Usia 7-15 tahun bersekolah
9. Jumlah anak lebih dari 2 dan berKB

d. Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga-keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan/kontribusi yang maksimal kepada masyarakat seperti memberikan sumbangan sesuatu dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan sebagainya.

Indikator Keluarga Sejahtera III adalah:

1. Mampu meningkatkan pengetahuan tentang agama
2. Mampu menabung sebagai penghasilannya
3. Dapat makan bersama keluarga sekaligus berkomunikasi
4. Ikut kegiatan masyarakat di tempat tinggal
5. Rekreasi bersama minimal satu kali dalam enam bulan
6. Mampu memperoleh informasi
7. Mampu dan memiliki sarana transportasi

e. Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya dan kebutuhan pengembangan serta dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan kepada masyarakat.

Indikator Keluarga Sejahtera III Plus adalah:

1. Secara sukarela memberikan sumbangan secara teratur
2. Aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan instansi

**c. *Penyebab Kemiskinan***

Selanjutnya Tjahya Supriatna (1997-20) menyatakan bahwa kondisi penduduk miskin disebabkan oleh:

1. Faktor penduduk yang terpuruk ke dalam lembah kemiskinan akibat dampak ketidakmerataan hasil pembangunan.

2. Sikap mental penduduk yang mengalami kemiskinan secara alamiah maupun kultural.
3. Kemiskinan alamiah ini ditunjukkan oleh situasi lingkaran ketidakberdayaan mereka yang bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan dan gizi, produktivitas, penguasaan modal, keterampilan dan teknologi serta hambatan infrastruktur maupun etnis sosial lainnya.

Selanjutnya menurut Jusman (1999:9) kemiskinan yang terjadi di Jawa Barat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja dan infrastruktur yang mendukung kelangsungan hidup mereka. Kondisi infrastruktur dapat dilihat dari banyaknya desa yang tertinggal.

Selanjutnya faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan menurut Harry Hikmat dalam Muhammad Hafsah (2008:32) dapat dikategorikan dalam dua hal sebagai berikut:

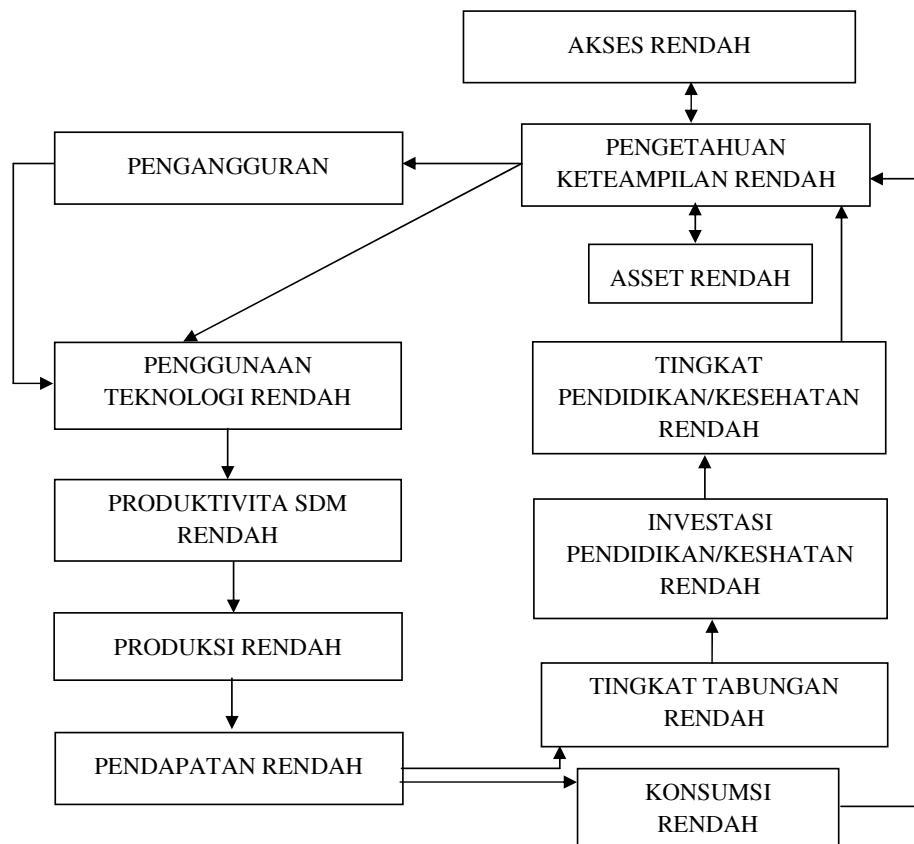
a. Faktor Internal

Faktor-faktor internal (dari dalam individu atau keluarga fakir miskin) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain berupa kekurangan maupun

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal (berada di luar individu atau keluarga yang menyebabkan terjadinya kemiskinan)

Akibat faktor internal dan eksternal tersebut mendorong orang-orang miskin masuk ke dalam perangkap lingkaran kemiskinan (*poverty circletrap*) seperti gambar berikut:



Gambar 1  
Penyebab Kemsikinan



## Kerangka Pemikiran

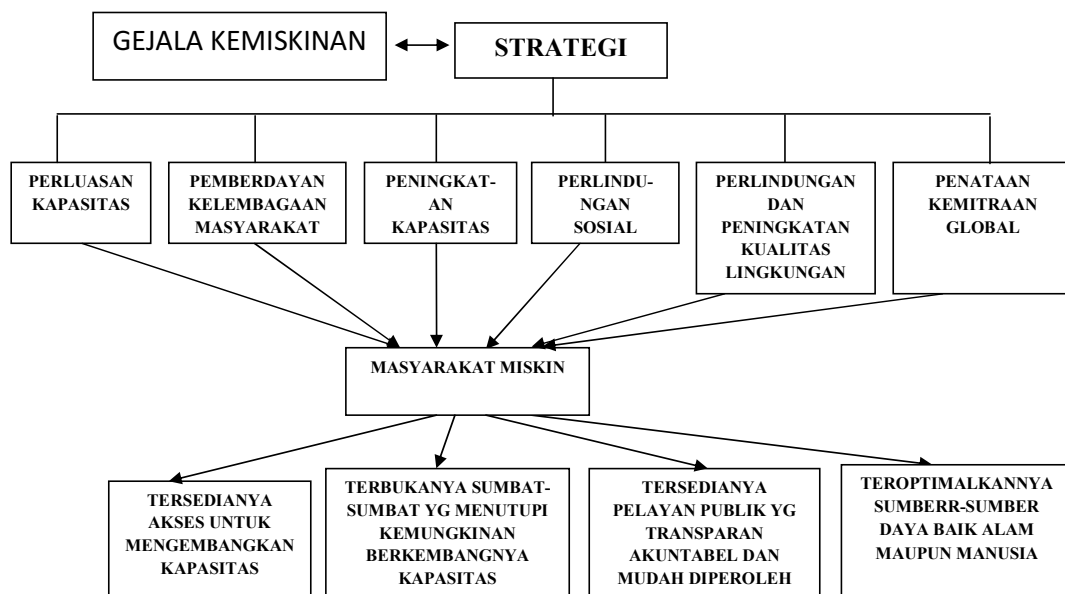
Kemiskinan telah diketahui sebagai suatu masalah multidimensi dan memberikan dampak ke berbagai sektor kehidupan. Karena itu strategi penanggulangan kemiskinan semaksimal mungkin dilakukan melalui pendekatan yang terpadu, pelaksanaan yang bertahap, terencana, dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat maupun masyarakat miskin itu sendiri.

Pemerintah Daerah selaku salah satu pengemban amanat rakyat harus senantiasa aktif untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, kesehatan dll.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan layanan dasar yang murah, mudah dan bermutu bagi masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah harus berpihak pada masyarakat miskin yang menjadi prioritas pembangunan di daerahnya dengan menggunakan sumber daya dan sumber dana yang lebih efisien dan efektif.

Dengan demikian secara umum tujuan penanggulangan kemiskinan adalah menjamin penghormatan, perlu dengan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap yang terwujud dalam kehidupan yang layak dan bermartabat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka konsep pemikiran dari Strategi Penanggulangan Kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2  
Kerangka Pemikiran Strategi Pengendalian Kemiskinan

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Pemilihan suatu desain penelitian yang sesuai sangat penting untuk keberhasilan proyek suatu penelitian. Weber (2006:167) mengatakan bahwa Desain penelitian adalah rencana dan struktur



penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Rencana itu merupakan suatu skema menyeluruh yang mencakup program penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian secara sistematis, faktual dan akurat kemudian menarik simpulan umum atas dasar data-data atau faktor-faktor yang bersifat khusus dari masalah yang dihadapi.

Menurut Lincoln and Guba dalam Sugiyono (2013:306) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

*“The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see that other forms of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human instrument has been used extensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data that the human instrument has produced.”*

### **Lingkup Operasional Penelitian**

Lingkup operasional penelitian dalam penelitian ini adalah analisis dari strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi yang dilakukan secara rasional oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi dengan memperhitungkan berbagai aspek terkait untuk mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan.

### **Sumber Data Penelitian**

Menurut Catherine Marshall, Gretchen B. Rosman dalam Sugiyono (2013:312) menyatakan bahwa, *“The fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review”*

Selanjutnya dikatakan menurut Sugiyono (2014:137) bahwa sumber data diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

1. *Person*, yaitu sumber data yang bias memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
2. *Place*, adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.
3. *Paper*, yaitu data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti yaitu buku-buku, peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman yang terkait dengan pelaksanaan program Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi

### **Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara (interview)

Menurut Esterberg dalam Sugiono (2007:72) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

b. Teknik Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki melalui observasi dilakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian dengan maksud untuk memperoleh gambaran nyata tentang kegiatan serta gejala yang ingin ditemukan pada obyek penelitian.

c. Dokumentasi

Arikunto (2006:236) mengemukakan bahwa studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

Dalam melaksanakan metode ini penulis melakukan penelitian melalui benda-benda tertulis antara lain seperti buku-buku, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, laporan-laporan, arsip-arsip dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan program terkait Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiono, 2004:169). Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu penelitian atau pengecekan data-data yang masuk mengenai kelengkapan dan keterkaitan dengan permasalahan yang ada. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap dan akurat sesuai dengan yang diinginkan.

b. Klasifikasi Data

Yaitu kegiatan mengatur, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkatagorisasikannya sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga akan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

c. Tabulasi Data

Yaitu kegiatan merumuskan data ke dalam bentuk tabel atau grafik. Data yang terkumpul dan bertumpuk-tumpuk serta uraian yang sulit dipahami dan diterjemahkan, diperlukan tabulasi sehingga data yang ada mudah dipahami dan dianalisis oleh peneliti.

d. Interpretasi data

Data yang telah dimasukkan ke dalam tabel (tabulasi) kemudian dicari makna atau artinya yang lebih luas dari data, dan selanjutnya diolah dengan menghubungkan pada ilmu pengetahuan atau hasil penelitian yang ada.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Geografis Lokasi Penelitian**

Kabupaten Sukabumi terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat dengan jarak tempuh 96 km dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 119 km dari Ibukota Negara (Jakarta). Secara geografis

wilayah Kabupaten Sukabumi terletak diantara 6o 57'1" - 7o 25'1" Lintang Selatan dan 106o 49'1" - 107o 00'1" Bujur Timur, dan mempunyai luas wilayah 4.162 km atau 14,39 % dari luas Jawa Barat atau 3,01%. Dari luas Pulau Jawa (Pemda Sukabumi, 2013).

Kabupaten Sukabumi batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bogor.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia.
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Samudra Indonesia.
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.
- Selain itu secara administratif Kabupaten Sukabumi juga berbatasan secara langsung dengan wilayah Kota Sukabumi yang merupakan daerah kantong (enclave) dikelilingi beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Sukabumi di Sebelah Utara, Kecamatan Cisaat, dan Kecamatan Gunung Guruh di sebelah barat, Kecamatan Nyalindung di sebelah selatan, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Kebon Pedes di sebelah timur.

Kabupaten Sukabumi beriklim tropis dengan suhu udara berkisar 19,7<sup>o</sup>-31,3<sup>o</sup>C dan kelembaban rata-rata sebesar 86.2 %. Udara yang cukup hangat tersaji hampir setiap tahunnya. Pada tahun 2011 curah hujan yang tertinggi tercatat di pusat pemantauan goalpara terjadi pada bulan Februari dengan curah hujan 640 mm dan terjadi selama 25 hari sedangkan curah hujan terkecil terjadi di bulan Agustus sebesar 1.0 mm.

Adapun potensi geologis Kabupaten Sukabumi yang sudah dimanfaatkan antara lain sumber panas bumi di daerah Gunung Salak dan Cisolok, bahan tambang dan bahan galian emas, perak dan batubara, pasir koarsa, marmer, pasir hitam, bentorit, teras, batu gamping, tanah liat dan lain-lain.

### **Kondisi Demografis**

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, sampai akhir Desember 2012 penduduk Kabupaten Sukabumi berjumlah 2.471.803 jiwa yang terdiri dari 1265.209 laki-laki dan 1.206.594 perempuan dengan kepadatan penduduk sebesar 578 Orang per km<sup>2</sup> dan jumlah KK sebanyak 693.547 KK.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha**

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha. Program yang dilaksanakan oleh berbagai Instansi di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi ini pada umumnya mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa program bahkan berhasil melampaui target kinerja (>100%) antara lain:

- Peluang kerja disektor pertanian (308%)
- Penempatan para pencari kerja (178,63%)

- Realisasi PMDN dan PMA (>100%)
- Peningkata Usaha Ekonomi Desa (267%)
- Peningkatan pemanfaatan lahan (1.115%)
- Pengembangan pasar dan obyek pariwisata (116–128%)

Beberapa program belum dapat atau masih kecil dalam mencapai target kinerja antara lain:

- Pendirian Lembaga Ekonomi Mikro (0%)
- Sarana Pengembangan seni budaya (0%)
- Pemanfaatan jenis mineral logam dan non logam (3,57%).

**Dalam program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,** permasalahan yang dihadapi Badan Pendidikan dan Pelatihan antara lain:

1. Ketersediaan peralatan latihan kerja yang relatif sudah tidak memadai karena sebagian besar merupakan hasil pengadaan tahun 1990
2. Keterbatasan jumlah instruktur latihan kerja.

Menurut Pemda Kabupaten Sukabumi (2014), solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melaksanakan Outsorcing terhadap SDM yang terlatih.

### **Program Peningkatan Ketahanan Pangan**

Program Peningkatan Ketahanan Pangan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, meliputi sektor Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Ketuhanan dan Perikanan dan Kelautan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Kabupaten Sukabumi yang luas wilayahnya merupakan daerah terluas di Jawa dan Bali (terdiri dari 47 Kecamatan dan 367 Desa/Kelurahan) serta tingginya populasi jumlah penduduk menyebabkan tumbuh dan berkembangnya permasalahan ketahanan pangan berpotensi terjadinya rawan pangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, budaya, politik, etnis, agama, penyimpangan perilaku, hukum dsb.
2. Belum optimalnya peran aktif potensi sumber kelompok Tani dalam membantu penanganan permasalahan ketahanan pangan. Hal ini disebabkan kurang/terbatasnya wawasan pengetahuan maupun kemampuan material dalam pemanfaatan sumber daya alam berbasis potensi lokal dan lingkungannya.
3. Masih rendahnya pemahaaman/pengetahuan mengenai permasalahan ketahanan pangan yang dimiliki baik oleh aparatur pemerintah maupun masyarakat khususnya kalangan yang berpotensi sebagai mitra kerja BKP (Badan Ketahanan Pangan).

Menurut Pemda Kabupaten Sukabumi (2014) solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Menentukan skala prioritas baik lokasi maupun jumlah besaran anggaran yang digunakan pada setiap kegiatan dan memberikan bantuan penunjang dalam rangka meningkatkan kemampuan, tenaga/sumber daya manusia dan sarana prasarana yang terdapat di lokasi guna meningkatkan pelayanan ketahanan pangan.
2. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya kalangan masyarakat yang merupakan indikasi rawan pangan di wilayah Kabupaten Sukabumi.

3. Menggali anggaran selain dari APBD Kabupaten Sukaabumi juga dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN walaupun bentuknya merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
4. Meningkatkan kemampuan dan pembinaan terhadap berbagai kategori yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan pangan.

### **Program Peningkatan Produksi Pangan**

Peningkatan produksi pangan disamping mampu menyerap tenaga kerja petani juga untuk mencegah terjadinya rawan pangan. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Produksi Peternakan:
  - Produksi telur tidak mencapai target tahun 2013 karena terjadinya kemarau yang cukup panjang sehingga peternak pada umumnya mengurangi populasi akibat ketersediaan air berkurang dan mutu baku air rendah.
  - Produksi daging tidak mencapai target tahun 2013 karena pada tahun tersebut terjadi pengurangan/penurunan populasi sapi potong akibat pembatasan sapi impor sehingga sapi lokal banyak yang dipotong.
  - Produksi susu tahun 2013 mengalami penurunan karena terjadi penurunan populasi sapi perah akibat banyak yang dipotong karena harga daging mahal.
  - Produksi ayam dan itik mengalami penurunan karena pada tahun 2013 terjadi serangan virus H5N1.
2. Produksi Tanaman Pangan
  - Produksi dan ketersediaan jagung tidak mencapai target karena areal tanaman jagung dipanen muda disebabkan faktor harga dan terdesak kebutuhan mengakibatkan banyak petani yang melakukan panen jagung muda sehingga produksi jagung pipilan kering tidak mencapai target.
3. Produksi Perikanan/Kelautan
  - Penghitungan peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan masih berdasarkan pendapatan kotor, sehingga belum mencerminkan Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Ikan.

Menurut Pemda Kabupaten Sukabumi (2014) solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Peningkatan pembinaan kepada peternak ayam buras untuk menerapkan *Good Farming Practice* dan memanfaatkan pakan sumberdaya lokal sehingga dapat menekan harga pakan.
2. Penerapan program swasemada daging sapi dan kerbau (PSDSK) dengan fokus antara lain penyediaan bibit sapi potong.
3. Pembinaan insentif pada peternak sapi perah dan memberikan bantuan bibit ternak sapi perah melalui Tugas Pembantuan APBN maupun APBD sehingga peternak yang telah menjual ternaknya tetap menjadi peternak sapi perah.
4. Peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit antara lain melalui pengamatan, pengawasan dan pencegahan.

## **Program Pemberdayaan Masyarakat**

Pemda Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat. Program yang dilaksanakan oleh berbagai instansi di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi ini pada umumnya mencapai target yang telah ditentukan.

Beberapa program bahkan berhasil melampaui target (>100%) antara lain:

1. Peningkatan partisipasi pembangunan di Kecamatan (167%)
2. Penguatan perempuan Kepala Keluarga (184%)
3. Pemberdayaan SDM Kelautan dan Perikanan (156,8–285,7%)
4. Pemberdayaan Masyarakat Kehutanan (185%)

Beberapa program belum dapat mencapai target kinerja antara lain:

1. Peningkatan peran PKS/TKSM dalam penanganan PMKS dan Kesos (42%)
2. Peningkatan partisipasi perempuan di masyarakat (19,2%)

Beberapa kendala yang dihadapi dalam program Pemberdayaan Masyarakat antara lain dalam pemberdayaan SDM di bidang pertanian yang terkait dengan pemberdayaan pelaku utama (petani) dan pelaku usaha pertanian, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah desa serta jumlah petani yang cukup banyak belum seimbang dengan jumlah penyuluh.
2. Banyaknya penyuluh yang pensiun dan penyuluh yang beralih ke jabatan struktural sehingga menghambat kinerja penyelegaraan penyuluhan.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penyuluhan.
4. Alih fungsi lahan produktif yang tidak terkendali, sehingga menghambat kinerja penyuluhan.
5. Rendahnya anggaran untuk peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di tengah berkembangnya teknologi dan informasi secara pesat.
6. Rendahnya minat generasi muda untuk menekuni bidang pertanian.

Menurut Pemda Kabupaten Sukabumi (2014) solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Pemberdayaan penyuluh swadaya dan penyuluh swasta.
2. Pengangkatan penyuluh PNS baru yang dibantu dengan penyuluh THL-TBPP Pusat dan Provinsi.
3. Penyelenggaraan penyuluhan melalui media radio (siaran pedesaan) sehingga menjangkau seluruh pelosok.
4. Membentuk POSLUHDES ditingkat desa sebagai *home base* di semua teknologi dan informasi di tingkat desa.
5. Penambahan sarana dan prasarana penyuluhan.

Selanjutnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemda Kabupaten Sukabumi juga melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Tujuan umum dari PNPM adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, sedangkan tujuan khusus dari PNPM antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan pengajaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
3. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
4. Meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

Program PNPM di Kabupaten Sukabumi terdiri atas PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dan PNPM Mandiri Perdesaan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

1. PNPM Mandiri Perkotaan

Program ini semula merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan pada tahun 2004 P2KP tersebut menjadi PNPM Mandiri Perkotaan dan Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan PNPM-MP mulai tahun 2008.

Pada tahun anggaran 2013 lokasi PNPM-MP di Kabupaten Sukabumi sebanyak 6 kecamatan yang mencakup 58 desa/kelurahan, yaitu Kecamatan Sukaraja (9 desa), Kecamatan Sukabumi (6 desa) Kecamatan Cisaat (13 desa), Kecamatan Cicantayan (7 desa), Kecamatan Cibadak (10 desa/kel) dan Kecamatan Cicurug (13 desa) dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 7.768.750.000,- yang bersumber dari:

- BLM Reguler (APBN) : Rp. 5.325.000.000,-
- BLM Reguler Shering Pemda (APBD) : Rp. 443.750.000,-
- BLM Replika Paket (APBD) : Rp. 2.000.000.000,-
- Bantuan Biaya Operasional (BOP) BKM : Rp. 580.000.000,-

2. PNPM Mandiri Perdesaan

Pada tahun 2013 Kabupaten Sukabumi melaksanakan Program PNPM Mandiri Perdesaan di 41 Kecamatan dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 55.250.000.000,- dengan rincian Rp. 52.250.000.000,- bersumber dari APBN dan Rp. 2.750.000,- bersumber dari *Cost Sharring* APBD Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB).

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana Surat Penetapan Camat (SPC) tahun 2013 terdiri 587 usulan yang mencakup 1.767 unit dalam 13 kelompok kegiatan, yaitu:

- Perbaikan jalan dusun dengan Telford
- Pembuatan jembatan beton untuk roda empat
- Pembuatan bendung sederhana



- Peningkatan gedung PAUD
- Pembuaataan gedung Posyandu
- Pembuaataan perpustakaan
- Pembuatan bangunan MCK
- Pembuatan tembok penahan tanah
- Pembuatan prasarana pendidikan
- Mebel sekolah
- Mebel di tempat kesehatan
- Simpan pinjam kelompok perempuan
- Peningkatan kapasitas kelompok

### **Program Peningkatan Kapasitas SDM**

Pemda Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui program Peningkatan Kapasitas SDM.

Program ini dilaksanakan oleh Instansi di lingkungan pemda Kabupaten Sukabumi khususnya yang terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan. Secara umum Program Peningkatan Kapaitas SDM di bidang pendidikan sebagian besar belum mrncapai target kinerja, sedangkan di bidng kesehatan sebagian besar mencapai target kinerja.

Di bidang pendidikan kegiatan fisik sekolah (pembangunan ruang kelas, rehabilitasi, pemagaran) dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah banyak yang tidak mencapai target, penyebabnya antara lain:

1. Tebatasnya lahan yang tersedia
2. Tebatasnya waktu yang tersedia
3. Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasinya
4. Dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas
5. Dan lain-lain.

Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin (JAMKESDA dan JAMKESMAS) dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakaat miskin, keluaran dari kegiatan ini antara lain:
  - Monitoring pelayanan kesehatan masyarakaat miskin, dengan realisasi 58 Puskesmas.
  - Pengadaan dan pendistribusian kartu Jamkesda dan Jamkesmas, dengan realisasi 200.000 lembar.
  - Pelatihan sistem rujukan dan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin bagi kader Posyandu.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar bagi masyarakat miskin, keluaran dari kegiatan ini antara lain:

- Pelayanan kesehatan masyarakat miskin, dengan realisasi 10.324 kasus.
- Tersedianya bantuan keuangan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas, dengan realisasi 345.360 kasus.

2. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas, Keluaran dari kegiatan ini antara lain tersedianya bantuan keuangan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas yang memerlukan bantuan perawatan, dengan realisasi 3.000 kasus.
3. Integrasi Sistem Informal dan Website Jampersal, keluaran dari kegiatan ini antara lain terintegrasi software Jampersal, dengan realisasi 58 Puskesmas.

Kendala yang dihadapi di bidang kesehatan terutama terdapat di lingkungan RSUD Pelabuhanratu dan RSUD Jampangkulon antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai
2. Sumber Daya Manusia (Medis, Non Medis, Penunjang Medis) belum sesuai dengan kebutuhan terutama dokter spesialis.
3. Di lingkungan RSUD Jampangkulon dari jumlah penduduk miskin Kabupaten Sukabumi wilayah VI dan sebagian wilayah VII sebanyak 423.517 jiwa, hanya 166.698 jiwa atau 36,6% yang mendapatkan bantuan kesehatan oleh Jamkesmas dan Jamkesda, sedangkan anggaran hanya mampu untuk melayani 1.142 pasien keluarga miskin.

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh RSUD dalam mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Mengajukan usulan kebutuhan sarana dan prasarana serta kebutuhan tenaga medis, non medis dan penunjang medis ke Pemda Kabupaten Sukabumi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat maupun ke Kementerian Kesehatan RI.
2. Meningkatkan promosi kesehatan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pendidikan dan kompetensi sumber daya serta menggalakkan profesionalisme dan loyalitas karyawan.

### **Program Perlindungan Sosial**

Pemda Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan program perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan. Program ini dilaksanakan oleh instansi di lingkungan Pemda Sukabumi khususnya oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Secara umum program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial telah mencapai target kinerja, bahkan kegiatan/program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Program Perlindungan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melampaui target yang telah ditentukan (>100%). Demikian pula program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh BPBD sebagian besar telah mencapai target kinerja.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam Program Perlindungan Sosial ini terutama terkait dengan penanggulangan bencana oleh BPBD, yaitu antara lain:

1. Kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejadian bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan korban jiwa dan kerusakan.
2. Meskipun perencanaan pembangunan telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bahaya, namun dalam kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Upaya penanganan ini masih belum sistemik dan kurang koordinasi.

Menurut Pemkab Kabupaten Sukabumi (2014) solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kordinasi antara semua pelaku penanggulangan bencana
2. Mengisi kekurangan pegawai di BPBD dan meningkatkan kemampuannya melalui diklat terkait penanggulangan bencana sehingga dapat bekerja secara profesional.

**g. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan**

Pemda Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui program Peningkatan Kualitas Lingkungan. Program ini dilaksanakan oleh instansi di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi, dan secara umum sebagian besar telah mencapai target yang telah ditentukan.

Beberapa program bahkan berhasil melampaui target (>100%) antara lain:

1. Tertanggulangnya titik genangan dalam Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (164,47%)
2. Jumlah desa terlayani dalam Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (210%)
3. Cakupan jamban keluarga alam Program Pengembangan Lingkungan Sehat (101,52)
4. Jalan lingkungan berondisi baik (100,52%)
5. Terbangunnya jalan desa (102,9%)
6. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (110%)

Sedangkan program yang belum mencapai target antara lain:

1. Penurunan jumlah kawasan perumahan kumuh (0%)
2. Terwujudnya rumah layak huni (14,02%)

Beberapa kendala yang dihadapi dalam Program Peningkatan Kualitas Lingkungan terutama terkait dalam Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan/Permukiman serta Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan/Permukiman

Kendala yang dihadapi antara lain:

- Belum tersedianya data base lingkungan kumuh dan masyarakat yang mendiami rumah tidak layak huni.
- Belum tersedianya data base Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat yang mengalami keterbatasan atau rawan air bersih.
- Belum tersedianya data base permukiman, diantaranya data base jalan lingkungan, drainase, jumlah titik genangan dan rumah layak huni.

Menurut Pemda Kabupaten Sukabumi (2014) solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
- Mengalokasikan anggaran sesuai rencana dan program berdasarkan data base yang telah disusun.

## 2. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kendala yang dihadapi antara lain:

- Belum tersedianya data base masyarakat rawan air minum, rawan air bersih dan rawan sanitasi.
- Belum tersedianya Master Plan air bersih, air limbah, dan drainase.
- Belum tersedianya Rencana Teknis Drainase sebagai turunan dari Rencana Induk Drainase kawasan.
- Banyaknya penyimpangan penggunaan Ruang Milik Jalan (RMJ) seperti permukiman yang merapat ke jalan dan lain-lain yang membuat saluran drainase terhalang bahkan tertutup akibatnya banyak sistem drainase jalan yang tidak berfungsi dengan baik.
- Belum optimalnya penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.

Menurut Pemda Kabupaten Sukabumi (2014) solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Penyusunan Master Plan air bersih, air limbah dan drainase.
- Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah dan air minum.
- Penyusunan RDTR agar penyusunan Rencana Induk dan Rencana Teknis Drainase Kawasan dapat segera dilaksanakan.
- Mengoptimalkan fungsi drainase jalan dengan cara memperketat pengendalian dan pengawasan IMB serta memberikan pengertian dan sosialisasi RMJ.
- Peningkatan Pengelolaan dan Penataan Ruang Tebuka Hijau.

## **Program Pengendalian Penduduk**

Pemda Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui Program Pengendalian penduduk. Program ini dilaksanakan oleh instansi di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi khususnya oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Perogram Pengendalian Penduduk yang dilaksanakan oleh BKKBD tahun 2013 realisasinya belum mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi yang cukup besar dan hampir mencapai target yaitu jumlah prevalansi peserta KB aktif (95,33%) dan cakupan peserta KB aktif (88,35%).

Sedangkan program transmigrasi khususnya jumlah KK transmigrasi yang diberangkatkan pada tahun berjalan realisasinya telah melampaui target (154,32%).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam Program Pengendalian Penduduk terkait pada pelaksanaan Program Keluarga Berencana yaitu sebagai berikut:

1. Biaya operasional petugas lapangan non PNS masih relatif terlalu kecil belum sesuai dengan beban tugas.
2. Masih rendahnya pencapaian peserta KB aktif pria karena kurangnya kesadaran kaum pria menjadi peserta KB (Medis Operasi Pria dan Kondom).
3. Tenaga yang ada di lapangan tidak sebanding dengan desa/kelurahan yang ada, dari 368 desa yang ada tenaga lapangan KB PNS hanya berkisar 105 orang.

Menurut Pemda Kabupaten Sukabumi (2014) solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja untuk petugas lapangan, maka telah dianggarkan honorarium Tenaga Penyuluh Penggerak Desa dalam anggaran tahun 2014 sebagai penggerak dan pendorong kegiatan-kegiatan operasional lini lapangan, sehingga diharapkan mekanisme operasional pada tingkat lini lapangan akan lebih optimal pada 368 desa.
2. Dalam meningkatkan pencapaian peserta KB Aktif pria dilakukan penyuluhan pada saat pelayanan KB, pembinaan KB dan penyuluhan pada momen strategis pada momen pertemuan multi pihak di setiap kecamatan bersama PKK, dinas Kesehatan, TNI, dan Instansi terkait lainnya.

### **Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Sukabumi**

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2013, perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi tahun 2011–2013 yaitu tahun 2011 = 13,46%, tahun 2012 = 13,01%, dan tahun 2013 = 12,57%.

Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan pada tahun 2013 telah mampu memperkecil jumlah penduduk miskin sebesar 0,44% yaitu dari 13,01% pada tahun 2012 menjadi 12,57% pada tahun 2013.

Penurunan jumlah penduduk miskin ini relatif masih kecil bahkan lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2012) sebesar 0,45% yaitu dari 13,46% pada tahun 2011 menjadi 13,01% pada tahun 2012. Karena itu perlu dilakukan penanggulangan kemiskinan yang lebih intensif dan terkoordinasi dari seluruh aparat (SKPD) dan partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi.

#### ***a. Upaya yang perlu ditingkatkan dalam Pengendalian Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi***

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, upaya yang perlu ditingkatkan dalam pengendalian kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha, upaya yang perlu ditingkatkan:
  1. Pendirian Lembaga Ekonomi Mikro mengingat program ini belum tercapai dan target yang diperoleh masih 0%
  2. Penambahan Sarana Pengembangan seni budaya mengingat program ini belum tercapai dan target yang diperoleh masih 0%
  3. Pemanfaatan jenis mineral logam dan non logam mengingat program ini target yang diperoleh baru sebesar 3,57%
- b. Dalam peningkatan ketahanan pangan, upaya yang perlu ditingkatkan adalah:
  1. Menambah populasi sapi, ayam dan itik untuk memenuhi kekurangan daging, susu dan telur
  2. Peningkatan produksi jagung pipilan.
- c. Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat, upaya yang perlu ditingkatkan adalah:
  1. Peningkatan peran PKS/TKSM dalam penanganan PMKS dan Kesos mengingat program ini target yang diperoleh baru sebesar 42%.

2. Peningkatam partisipasi perempuan di masyarakat mengingat program ini target yang diperoleh baru sebesar 19,2%.
- d. Dalam program peningkatan kapasitas SDM, upaya yang perlu ditingkatkan adalah:
  1. penambahan sarana dan prasarana pendidikan;
  2. menambah SDM (medis, non-medis dan penunjang medis) serta sarana dan prasarana kesehatan khususnya di RSUD Pelabuhanratu dan Jampangkulon.
- e. Dalam program Perlindungan Sosial, upaya yang perlu ditingkatkan adalah:
  1. peningkatan koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah;
  2. peningkatan pengetahuan kepada masyarakat dalam menghadapi bencana daerah jika sewaktu-waktu terjadi.
- f. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan, upaya yang perlu ditingkatkan adalah:
  1. Menurunkan jumlah kawasan perumahan kumuh mengingat program ini belum tercapai dan target yang diperoleh masih 0%
  2. Merwujudkan rumah layak huni mengingat target yang diperoleh masih program ini baru 14,02%

***b. Strategi yang perlu ditingkatkan dalam Pengendalian Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi***

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pembahasan tersebut di atas strategi yang perlu ditingkatkan dalam pengendalian kemiskinan di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, strategi yang perlu ditingkatkan adalah dengan menambahkan peralatan latihan kerja dan menambah instruktur yang berkualitas.
- b. Dalam Program Peningkatan Ketahanan pangan strategi yang perlu ditingkatkan adalah:
  1. pengendalian pertumbuhan penduduk
  2. meningkatkan pengetahuan, keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kelompok tani maupun aparatur pemerintah yang ada agar mampu memanfaatkan SDA sesuai dengan potensi lokal dan kondisi lingkungan setempat.
  3. menambah sumber penyediaan irigasi yang cukup untukantisipasi musim kemarau.
  4. Peningkatan kebersihan kandang dan mengantisipasi virus H5N1.
- c. Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang pertanian strategi yang perlu ditingkatkan adalah:
  1. Penambahan tenaga penyuluh pertanian;
  2. Penambahan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
  3. Pengendalian alih fungsi lahan produktif.
  4. Peningkatan anggaran penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  5. Meningkatkan minat generasi muda untuk menekuni bidang pertanian
- d. Dalam program peningkatan kapasitas SDM strategi yang perlu ditingkatkan adalah:
  1. Penyediaan lahan untuk keperluan pendidikan, penanggulangan bencana daerah

- Pengalokasian dana pendidikan dan kesehatan,
- 2. Menambah tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.
- e. Dalam program Perlindungan Sosial, strategi yang perlu ditingkatkan adalah melaksanakan program penanggulangan bencana daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
- f. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan strategi yang perlu ditingkatkan adalah:
  - 1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat,
  - 2. Sosialisasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- a. Upaya yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan strategi pengendalian kemiskinan di Kabupaten Sukabumi adalah:
  - 1. Pendirian Lembaga Ekonomi Mikro.
  - 2. Penambahan Sarana Pengembangan seni budaya.
  - 3. Pemanfaatan jenis mineral logam dan non logam.
  - 4. Menambah populasi sapi, ayam dan itik untuk memenuhi kekurangan daging, susu dan telur.
  - 5. Peningkatan produksi jagung pipilan.
  - 6. Peningkatan peran PKS/TKSM dalam penanganan PMKS dan Kesos.
  - 7. Peningkatan partisipasi perempuan di masyarakat.
  - 8. Penambahan sarana dan prasarana pendidikan.
  - 9. Menambah SDM (medis, non-medis dan penunjang medis) serta sarana dan prasarana kesehatan khususnya di RSUD Pelabuhanratu dan Jampangkulon
  - 10. Peningkatan koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah;
  - 11. Peningkatan pengetahuan kepada masyarakat dalam menghadapi bencana daerah jika sewaktu-waktu terjadi.
  - 12. Menurunkan jumlah kawasan perumahan kumuh.
  - 13. Merwujudkan rumah layak huni.
- b. Strategi yang perlu dikembangkan dalam pengendalian kemiskinan di Kabupaten Sukabumi
  - 1. Menambahkan peralatan latihan kerja dan menambah instruktur yang berkualitas.
  - 2. Pengendalian pertumbuhan penduduk
  - 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kelompok tani maupun aparatur pemerintah yang ada agar mampu memanfaatkan SDA sesuai dengan potensi lokal dan kondisi lingkungan setempat.
  - 4. Menambah sumber penyediaan irigasi yang cukup untukantisipasi musim kemarau.



5. Peningkatan kebersihan kandang dan mengantisipasi virus H5N1.
6. Penambahan tenaga penyuluh pertanian.
7. Penambahan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.
8. Pengendalian alih fungsi lahan produktif.
9. Peningkatan anggaran penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
10. Meningkatkan minat generasi muda untuk menekuni bidang pertanian
11. Penyediaan lahan untuk keperluan pendidikan,
12. Peningkatan penanggulangan bencana daerah
13. Pengalokasian dana pendidikan dan kesehatan,
14. Menambah tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.
15. Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan bencana daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
16. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat,
17. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

## **Saran**

Adapun saran yang diajukan dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dimaknai sebagai usaha bersama, di mana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah harus didukung pula dengan peran serta masyarakat dan sektor swasta. Selama penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh satu pihak saja, maka tingkat keberhasilan cenderung kurang optimal. Karena itu partisipasi masyarakat miskin yang paling mengetahui kebutuhan orang miskin tidak semata-mata menjadi obyek saaja tapi keterlibatannya hendaklah sebagai subyek yang akan lebih mendukung keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
- b. Pendekatan penanggulangan kemiskinan sudah bukan jamannya lagi berorientasi proyek, tetapi hendaklah berorientasi pada program dimana pendekatan hasil (output) bukanlah segala-galanya tapi pendekatan proses juga harus lebih dipentingkan.
- c. Walaupun sudah banyak program penanggulangan kemiskinan diluncurkan baik oleh lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan, dan banyak biaya yang dianggarkan untuk biaya penanggulangn, akan tetapi faktanya jumlah penduduk miskin masih tinggi, dan penduduk rentan miskin juga relatif tinggi, karena itu diperlukan keterpaduan semua pihak agar dalam penanggulangan kemiskinan mendapatkan hasil yang optimal.
- d. Agar penanggulangan kemiskinan dapat lebih optimal, diperlukan sebuah pedoman dan acuan khusus yang memadukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dan agar pedoman tersebut tidak sekedar arsip saja, maka akan lebih berarti jika dituangkan dalam Perda tersendiri, sehingga dokumen itu akan bersifat tetap dan mengikat setiap orang serta memberikan konsekuensi hukum bagi yang tidak melaksanakannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arikunto, Suharsimi. 2006 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Sutrisno. 1991. *Methodology Research*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hafsah, Mohammad Jafar. 1999. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Institute for Religius and Institutional Studies (IRIS) Press. Bandung.
- Jusman, Iskandar. 1999. *Teori dan Isu Pembangunan*. Program Pascasarjana UNIGA. Garut.
- Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi.
- Moleong, J Lexy. 1989. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution, S. 1993. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Salusu, J,. 1999. *Pengambilan Keputusan Strategi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suradinta, Ermaya. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta.
- Todaro, Michael P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga. Edisi Keempat Jilid* Jakarta: Erlangga
- Winardy, Nisar. 1997. *Manajemen Strategi*. Bandung: CV. Mandiri Maju
- Sukabumikab.bps.go.id/index.php/penduduk-dan-tenaga-kerja

### **Lain-lain**

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2013, Sekretariat Daerah pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014
- Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2011, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sukabumi
- Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2012, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sukabumi
- Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2013, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sukabumi.